



LEMHANNAS RI  
THE NATIONAL RESILIENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

# newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva

edisi 79, Februari 2016

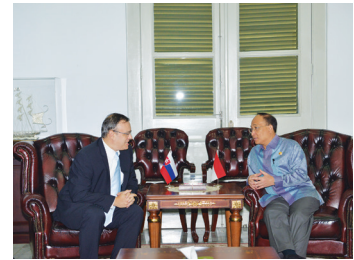


## Menpan RB: Pejabat Tinggi Sebaiknya Harus Masuk Lemhannas

**R**abu (3/2), Lemhannas RI menyelenggarakan sarasehan dalam rangka HUT Korpri ke-44 di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gd. Pancagatra Lt. III Lemhannas RI. Dalam sarasehan ini turut hadir Menteri PAN RB Prof.Dr. Yuddy Chrisnandi, Ketua KORPRI Pusat sekaligus menjabat Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, dan Sekretaris Utama BKN Usman Gumati.... (selengkapnya hal. 6)



**4** Karyawan Terbaik Bank Mandiri Ikuti Taplai



**5** Kunjungan Duta Besar Slovakia



**8** Pemeriksaan Laporan Keuangan



**10** Diskusi Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

## Daftar Isi

2. Ryoichi Oriki – Lemhannas RI Diskusikan Laut Tiongkok Selatan
3. Tanpa Exit Permit, Perjalanan Dinas Tidak Akan Dibayarkan Pemerintah
4. Karyawan Terbaik Bank Mandiri Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
5. Kunjungan Duta Besar Slovakia
6. Menpan RB: Pejabat Tinggi Sebaiknya Harus Masuk Lemhannas
7. Tiga Perkara Untuk Dapat Menikmati Manisnya Iman
8. Pemeriksaan Laporan Keuangan Sebagai Wujud Keseriusan
9. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Sebagai Unsur Nation Character Building
10. Diskusi Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
11. Nilai-Nilai Kebangsaan, Modal Dasar Jadi Inspirasi
12. Konsolidasi Petunjuk Teknis Mekanisme Operasional PPRA LIV Dan LV

## Tim Redaksi:

### Pengarah :

Suhardi Alius

### Penanggung Jawab :

E. Estu Prabowo

### Redaktur Pelaksana :

Wahyu Widji Pamungkas

### Penyunting/Editor :

Bambang Iman Aryanto

### Staf Redaksi :

Trias Noverdi, Aditya Solehah,

Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona

Permatasari, Magista Dian Fitrilia, Nia Yola

### Desain

Bambang Iman Aryanto

### Fotografer :

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

### Sekretariat :

Linda Purnamasari, Gatot, Indah Winarni

### Distribusi :

Supriyono, Deannisa, Ayu Novitasari

### Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

## Ryoichi Oriki-Lemhannas RI Diskusikan Laut Tiongkok Selatan



**G**eneral (Ret) Japan Ground Self Defence Forces Ryoichi Oriki bersama Atase Pertahanan Jepang di Jakarta CAPT (N) Hiroshi Komiya, Interpreter/Penerjemah dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, dan 2 (dua) staf Kedutaan Jepang di Indonesia mengunjungi Lemhannas RI pada Senin (1/2).

Kunjungan tersebut diterima Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA untuk melakukan *Courtesy Call* di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lt.I dengan didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr, Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, dan Direktur Pengkajian Politik Drs. Hanif Salim, M.A.

Usai *Courtesy Call*, delegasi dari Jepang dan Lemhannas RI melakukan diskusi mengenai Laut Tiongkok Selatan di Ruang Airlangga Gd. Astagatra Lt.III. Topik tersebut diangkat karena mencermati perkembangan dewasa ini, Asia mengalami banyak sekali pergerakan yang signifikan diantaranya seperti di Tiongkok dengan konflik Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, dan Korea Utara yang melakukan beberapa kali uji coba nuklir sehingga menciptakan instabilitas kawasan.

Menanggapi hal tersebut, Ryoichi Oriki mengatakan upaya Tiongkok menguasai Laut Tiongkok Selatan beserta sumber kekayaan alamnya tidak terlepas dari upayanya menjadi kekuatan maritim di dunia.

Pergerakan signifikan dari Tiongkok dan Korea Utara di Asia Timur, Ryoichi Oriki menambahkan, harus diimbangi dengan *balance of power* yang digagas komunitas internasional dengan mengedepankan pendekatan multilateral atau melibatkan banyak negara.



Foto: Humas Lemhannas RI

## Tanpa *Exit Permit*, Perjalanan Dinas Tidak Akan Dibayarkan Pemerintah

“**S**ekarang lebih dipertegas bahwa tanpa *exit permit* maka seluruh perjalanan dinas tersebut tidak akan dibayarkan oleh pemerintah”, jelas Wakil Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Juviano D.S. Ribeiro dalam Sosialisasi Pelayanan Dinas Luar Negeri pada Senin (1/2), di Ruang Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Saat ini, Konsuler Kementerian Luar Negeri telah melakukan Memorandum Of understanding (MOU) dengan 56 negara yang membebaskan paspor dinas untuk keluar masuk di 56 negara tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah-celah untuk mendapatkan paspor dinas tersebut.

Ada tiga jenis pelayanan yang digunakan konsuler untuk mengurus paspor dinas dan diplomatik yaitu penerbitan paspor dinas dan diplomatik, *exit permit* (izin untuk meninggalkan negara dimana seseorang tersebut tinggal dengan tujuan untuk berpergian ke negara lain baik untuk wisata/ untuk sesuatu urusan tertentu/ untuk urusan pekerjaan) dan rekomendasi visa.

Berdasarkan pada catatan tahun 2015, Juviano D.S. Ribeiro menyebutkan ada 20 kali perjalanan beberapa pejabat keluar negeri

tanpa *exit permit* dan diantaranya beralasan karena pelayanan penerbitan paspor dinas dan diplomatik yang cukup lama.

Jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 2011 dan diatur pada PP No. 31 Tahun 2013, perjalanan keluar negeri menggunakan paspor dinas dan diplomatik tanpa *exit permit* dapat diartikan sebagai perjalanan pribadi yang seharusnya tidak boleh menggunakan paspor dinas dan diplomatik.

Juviano D.S. Ribeiro juga menyebutkan banyak kendala yang dihadapi dalam pembuatan paspor serta pelayanan terbitnya paspor diantaranya pemalsuan paspor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, penggunaan calo dalam pembuatan paspor, pencetak paspor hanya satu dan kualitasnya masih tertinggal dengan negara lainnya, pelayanan penerbitan paspor paling lambat tiga/empat hari, serta pungutan-pungutan dari agen yang bukan berasal dari pihak direktorat konsuler dalam penerbitan paspor.

Sosialisasi yang diselenggarakan usai apel pagi ini dihadiri oleh para pejabat struktural, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional dan seluruh staf Lemhannas RI.

# Karyawan Terbaik Bank Mandiri Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan



Foto : Humas Lemhannas RI

**M**andiri Best Employee (MBE) mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan selama empat hari yang dibuka oleh Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Ir. Yuhastihar pada Selasa (2/2), di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI.

Peserta yang mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini, memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat eksekutif Bank Mandiri sebagai wujud apresiasi terhadap pencapaian kinerja para peserta yang menjadipanutan dalam mengimplementasikan budaya kerja perusahaan, menularkan nilai-nilai keteladanan, meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja.

Bagi Bank Mandiri, tantangan ke depan yang semakin kompleks menjadi alasan mengapa perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan prioritas layanan terbaik kepada nasabah.

Selain sebagai wadah bertukar pikiran, mentransformasikan diri,

dan bekerja sama guna memperluas wawasan kerja antar peserta, kegiatan yang diikuti oleh 190 peserta ini juga memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan agar peserta memiliki kesadaran yang kuat untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara.

Yuhastihar sendiri mengatakan bahwa sebagai staf yang baik harus berperilaku mandiri, handal, tangguh, tanggungjawab, dan percaya diri agar dapat mengantisipasi efek-efek negatif yang dapat mengganggu stabilitas perbankan.

Materi yang diberikan dalam pemantapan ini diantaranya wawasan Nusantara, Kepemimpinan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, materi dan kegiatan lain yang diberikan yaitu Tunas Integritas dari KPK, bakti sosial di lingkungan masyarakat di Kepulauan Seribu, dan Orientasi Kehidupan di atas Kapal KRI Banjarmasin 592.



# Kunjungan Duta Besar Slovakia

**S**elasa (2/2), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA menerima kunjungan Duta Besar Slovakia YM Michal Slivovic untuk melakukan *Courtesy Call* (CC) di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Michal Slivovic menilai Lemhannas RI selain sebagai lembaga *think-tank* pemerintah melalui bidang pengkajian, juga memiliki peran dalam bidang pendidikan kader pimpinan tingkat nasional di Indonesia.

Selain itu, Duta Besar Slovakia juga berbagi informasi mengenai pertahanan militer, *military training* dan juga *defence industry*. Slivovic

berharap Slovakia dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Lemhannas RI tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang pertahanan.

Turut hadir mendampingi Gubernur adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, Deputy Pengkajian Strategis Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, Kepala Biro Kerja Sama Brigjen TNI Ivan R Pelealu, S.E, Tenaga Profesional Lemhannas RI Ambassador Sebastianus Sumarsono dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Wahyu Widji Pamungkas, S. Kom., M.M.

# Menpan RB: Pejabat Tinggi Sebaiknya Harus Masuk Lemhannas

**R**abu (3/2), Lemhannas RI menyelenggarakan sarasehan dalam rangka HUT Korpri ke-44 di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gd. Pancagatra Lt. III Lemhannas RI. Dalam sarasehan ini turut hadir Menteri PAN RB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, Ketua KORPRI Pusat sekaligus menjabat Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, dan Sekretaris Utama BKN Usman Gumati.

Dalam sarasehan yang mengangkat tema “Bersama TNI dan Polri, Membangun ASN yang Handal dan Profesional dalam rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menyatakan harus ada sinergi antara ASN dengan TNI dan Polri secara umum maupun secara khusus untuk memperkuat keyakinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pada kesempatan ini, Menteri Yuddy yang hadir sebagai salah satu

narasumber menyatakan peran penting Lemhannas RI membentuk visi dan persepsi pejabat tinggi pemerintah dalam memandang Indonesia. “Pimpinan tinggi harus memahami nilai-nilai dan wawasan kebangsaan”, ungkap Yuddy.

Menteri Yuddy juga menekankan bahwa semua pejabat tinggi, baik yang akan menjadi pejabat atau yang sudah menjabat, bahkan menteri, sebaiknya diharuskan untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI agar para pejabat tersebut memiliki visi yang sama terhadap Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa salah satu tugas aparatur sipil negara yang juga harus menjadi jati diri adalah sebagai perekat bangsa.

Sarasehan yang merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT Korpri ini, dihadiri oleh para pejabat struktural, para Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional dan segenap personel Lemhannas RI yang berasal dari TNI, Polri maupun ASN.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

## Tiga Perkara Untuk Dapat Menikmati Manisnya Iman

**S**embangun Mental Kerja Melalui Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi tema yang diangkat ketika Lemhannas memperingati Maulid Nabi 1437 H pada Kamis (4/2), di Ruang Auditorium Gajah Mada, Lt.III, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Peringatan Maulid Nabi ini bertujuan mengingatkan seluruh umat muslim untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, terdapat tiga hal penting yaitu untuk menekuni kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, meneladani perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad dalam perbuatan kita sehari-hari, dan melestarikan ajaran perjuangan Nabi Muhammad dalam misi rahmatan lil alamin.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan bahwa Peringatan Maulid Nabi tidak hanya ritual yang diperingati setiap tahun namun merupakan momentum bagi umat islam untuk melakukan introspeksi diri dan perenungan batin dalam meneladani Nabi Muhammad SAW.

Sementara K.H. Dr. Syarif Rahmat, M.Ag yang hadir sebagai penceramah menyampaikan bahwa terdapat tiga perkara untuk menikmati manisnya iman dalam hadits riwayat Bukhari yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari makhluk lainnya, mencintai seseorang karena Allah, dan membenci kekufuran.

# Pemeriksaan Laporan Keuangan Sebagai Wujud Keseriusan



**B** PK RI akan melaksanakan pemeriksaan di Lemhannas RI selama 55 hari yang dimulai pada tanggal 9 Februari hingga 26 April 2016,” ucap Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Didid Widjanardi, S.H dalam acara Taklimat Awal Pemeriksaan Tim BPK RI Atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2015 pada Selasa (9/2), di Ruang Nusantara II, Lt.I Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Dalam acara tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara I Tim BPK RI Dr. Heru Kreshna Reza menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tersebut. “Mudah-mudahan lebih baik dari tahun sebelumnya sebagai wujud keseriusan dalam pengelolaan keuangan Lemhannas yang lebih akuntabel dan transparan”, jelas Heru Kreshna.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan yang dilakukan BPK RI merupakan wujud tanggungjawab bersama dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Guna menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI agar membantu jalannya proses pemeriksaan tim BPK RI melalui kerja sama yang baik dengan menyediakan dokumen dan

informasi yang menjadi lingkup pemeriksaan dari tim BPK RI”, ujar Budi Susilo Soepandji.

“Diharapkan pemeriksaan tim BPK RI dapat memutuskan opini secara tepat terhadap sejauh mana Lemhannas RI telah mengelola keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai dokumen terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus disiapkan dengan lengkap, cepat, dan komunikatif agar tim pemeriksa dapat mengambil kesimpulan dan pemilihan yang objektif”, ungkap Budi Susilo Soepandji.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, Lemhannas RI akan terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM dan memperbaiki kualitas sistem manajemen pada tugas pokok dan fungsi kedeputian maupun tugas pendukung kesetamaan, serta mendorong peningkatan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, para Deputy, para Wakil Koordinator, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional, para Kepala Biro, para Pejabat Struktural Lemhannas, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI.



# Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Sebagai Unsur *Nation Character Building*

**P**emantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Staf PT. Bank Negara Indonesia Tahun 2016 dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA pada Rabu (10/2), di Ruang Pancasila Gd. Trigatra Lt. III Lemhannas RI.

Dalam sambutan pembukaannya, Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa para peserta harus mampu menjadi panutan dalam mengimplementasikan budaya kerja yaitu profesionalisme, integritas, wawasan, kompetensi, jujur dan disiplin dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat.

Selain itu, Budi Susilo Soepandji menambahkan bahwa nilai-nilai kebangsaan sangat penting sebagai perekat persatuan bangsa ditengah kebhinnekaan dan menjadi unsur utama dalam membangun karakter kebangsaan dalam bernegara / *nation character building*.

Dalam pemantapan selama tiga hari tersebut, materi yang diberikan kepada 60 peserta menggunakan metode ceramah dan tanya-jawab,

diskusi, dan pembinaan peserta. Ada tiga kategori materi yaitu yang diberikan, yaitu: (1) Dasar, meliputi implementasi wawasan nusantara dan ketahanan nasional, implementasi kewaspadaan nasional dan kepemimpinan nasional; (2) Utama, mencakup implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; (3) Penunjang, mencakup pemberdayaan wilayah dalam perspektif geopolitik dan geostrategi, pengantar nilai-nilai kebangsaan, dan sejarah perjuangan bangsa.

“Manfaatkan kegiatan tersebut sebagai wadah bertukar pikiran, menambah pengalaman, memperluas jaringan kerja antar peserta, dan sebagai sarana mentransformasikan diri sebagai pejabat perbankan yang senantiasa memperjuangkan kepentingan masyarakat”, harap Budi Susilo Soepandji.



Foto : Humas Lemhannas RI

# Diskusi Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

**G**ubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA membuka Acara Diskusi Kelompok Terarah dengan tema “Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Yang Komprehensif Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional” pada Rabu (10/2), di Ruang Nusantara II Gd. Trigatra Lt.I Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Susilo Soepandji menyampaikan bahwa tujuan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) adalah untuk mewujudkan sistem dan mekanisme dalam menangani berbagai permasalahan keamanan nasional secara cepat, tepat, dan tuntas sehingga dapat terwujud keamanan nasional yang komprehensif.

Narasumber dalam diskusi tersebut yaitu Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Kabainstranas) Mayjen TNI Paryanto, Mewakili Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, S. Sos, Ditjen Polpum Kemendagri Didi Suidiana, S.E. Sebagai Penanggap Staf Ahli Kepala BIN Edy Supriyanto, Sekjen Wantannas Letjen TNI M. Munir, Pengamat dan Ahli Pertahanan Letjen TNI (Purn) Agus Wijoyo, Staf Khusus Bidang Perundang-Undangan Kemendagri Lambock V Nahattands, S.H., M.A, Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto. Diskusi ini dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastro Wingarta, S.IP., M.Sc.

Sementara itu, Badrodin Haiti dalam paparannya mengatakan bahwa pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) belum merupakan kebutuhan spesifik negara. “Apakah harus dibentuk lembaga baru? karena belum tentu lembaga yang baru dibentuk bisa berjalan efektif apalagi sampai ke daerah-daerah”, jelas Badrodin Haiti.

Menanggapi paparan yang disampaikan oleh Badrodin Haiti, Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto mengatakan bahwa DKN berfungsi untuk memberikan pertimbangan (*advisory work*) dalam bidang-bidang keamanan nasional namun tidak memiliki kewenangan operasional.

Sementara Didi Suidiana, S.E menjelaskan bahwa keamanan nasional sangat penting, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum”. Konsep keamanan dalam negeri ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 6 dengan indikator rasa aman yang merupakan sarana pencapaian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan kewenangan dari unsur-unsur keamanan yang perlu pertimbangan dalam regulasi dan juga harus ada sinergi dari berbagai pihak dalam mengelola keamanan.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

## Nilai-Nilai Kebangsaan Modal Dasar Jadi Inspirasi

Jumat (12/2), Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH menutup Acara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Staf PT. Bank Negara Indonesia Tahun 2016 dengan ditandai pemberian sertifikat secara simbolis kepada para peserta di Ruang Pancasila Gd. Trigatra Lt. III Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Suhardi Alius mengatakan, materi pemantapan nilai kebangsaan yang disampaikan kepada peserta adalah untuk mengantisipasi melunturnya nasionalisme dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang perbankan. "Materi yang diberikan dalam kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai modal dasar untuk dapat menjadi inspirasi dalam lingkungan kerja dan juga keluarga", ujar Suhardi Alius.

Sebagai pegawai perbankan, para staf PT. Bank Negara Indonesia harus mampu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dengan mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD

1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) demi menjamin utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Suhardi Alius berharap para peserta mampu meningkatkan komitmen dan kesadaran bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu, staf maupun pejabat di lingkungan perbankan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tiga hari sejak 10 Februari 2016 lalu, dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diharapkan mampu menambah wawasan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Selain materi yang telah diberikan, kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ditutup dengan pembuatan komitmen bersama yang dapat melengkapi kemampuan peserta untuk membuat suatu ide dan gagasan yang mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong.



Foto : Humas Lemhannas RI

## Konsolidasi Petunjuk Teknis Mekanisme Operasional PPRA LIV dan LV

**K**edeputian Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional menyelenggarakan konsolidasi program kerjanya pada Selasa (16/2), di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gd. Trigatra Lt.III. Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Dalam laporannya, PLH (Pelaksana Harian) Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Brigjen TNI Juwondo menyampaikan bahwa tujuan konsolidasi program kerja kedeputian pendidikan adalah untuk menyosialisasikan petunjuk teknis kedeputian pendidikan dan penyamaan persepsi semua aspek dalam penyelenggaraan PPRA (Program Pendidikan Reguler Angkatan) LIV dan LV Tahun 2016.

Kegiatan konsolidasi program kerja kedeputian pendidikan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut, diikuti oleh 107 peserta yang terdiri dari Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta Pejabat Struktural. Oleh karena itu, kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis dalam proses pendidikan seperti yang tercantum

pada misi Lemhannas RI yaitu pendidikan yang berkarakter sesuai dengan paradigma nasional.

Materi yang diberikan kepada peserta selama tiga hari yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan program pendidikan tahun 2016, kurikulum pendidikan, revisi petunjuk teknis (Juknis) mekanisme operasional pendidikan, revisi juknis pembinaan peserta, revisi juknis mekanisme bentuk tulisan dan diskusi (DD, DK, dan DAK), revisi juknis rangkuman dan essay, revisi juknis penulisan Taskap, juknis praktek kepemimpinan, revisi juknis sosiometrik dan angket, revisi juknis *e-learning*, sosialisasi *tele conference*, *e-evaluation* dan penggunaan *smartphone*, dan revisi juknis penilaian peserta.

Dengan dilaksanakannya konsolidasi ini, Gubernur Lemhannas RI berharap dapat meningkatkan dan menampilkan performa serta kinerja yang lebih baik dalam penyelenggaraan tugas, peran, dan fungsi Lemhannas khususnya pada penyelenggaraan kedua jenis program pendidikan PPRA dan P3DA tahun ini.